

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

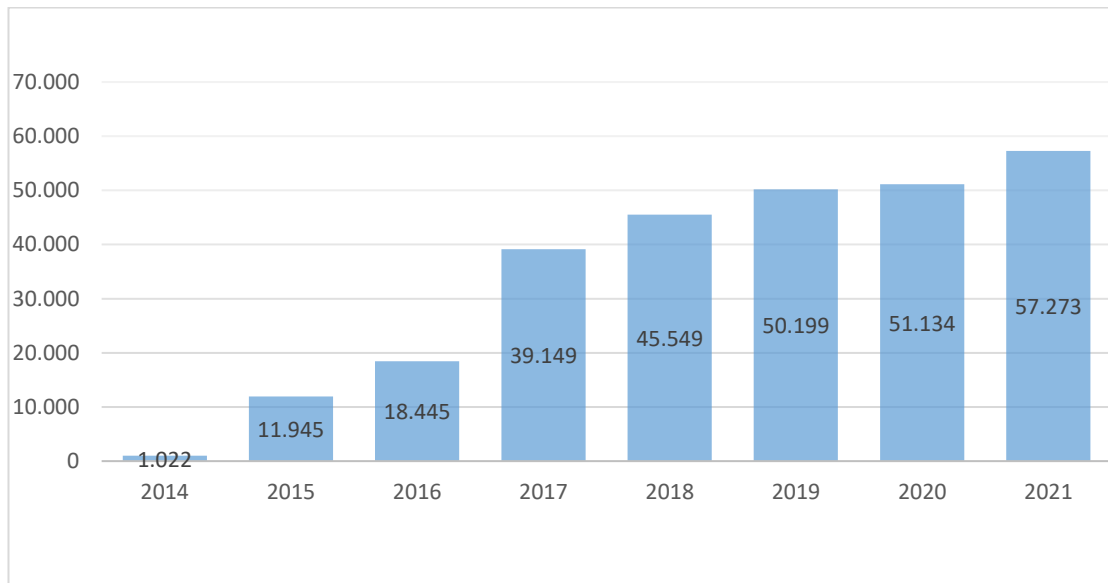
Dalam rangkaian pembangunan daerah dan nasional, pembangunan desa penting dan strategi karena didalamnya mengandung unsur pemetaan yang secara langsung menyentuh kepentingan dan kesejahteraan mayoritas Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, namun pembangunan pedesaan masih kurang sehingga banyak pedesaan tertinggal. Pembangunan negara dicapai pada tingkat terendah, yang disebut otonomi pedesaan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, otonomi desa ditujukan dalam menentukan efisiensi pelaksanaan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan menetapkan/mengelola alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan, serta mengatur pemerintahan desa, dan lebih kompetitif dalam perihal daya saing desa. Praktik kebijakan pembangunan saat ini lebih mengarah dan berpihak pada pembangunan perkotaan daripada pedesaan, sehingga terjadi kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Upaya pemerintah untuk membentuk kemandirian desa dan meningkatkan daya saingnya antara lain berupa dana dalam program pembangunan desa, salah satunya adalah pembentukan Lembaga Ekonomi Desa (LED) melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

BUMDes adalah salah satu usaha desa yang berbentuk lembaga yang pengelolaannya diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa atau dalam hal usaha desa untuk desa dan oleh desa. Namun dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat dan menyebutkan bahwa pendirian BUMDes dilakukan

sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan potensi desa yang dimiliki tujuan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dari PP No.11 tahun 2021 tentang BUMDes terdapat adanya isu-isu yang diatur yaitu dalam akses permodalan/pinjaman, pajak/retribusi BUMDes, pemberhentian kegiatan usaha BUMDes, aturan penilaian bisnis, bantuan ke BUMDes, transformasi dan integrasi. Dengan tersedianya Badan Usaha Desa (BUMDes), pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara mandiri, memungkinkan pemerintah desa untuk menetapkan program yang sesuai dengan potensi desanya (Maryam et al., 2022).

Peran BUMDes dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa terkait BUMDes untuk keuntungan dan pembangunan desa melalui hibah paten, bantuan sosial dan dana perputaran dalam rencana pendapatan dan belanja desa, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan untuk masyarakat yang kurang mampu. Penduduk desa, khususnya pada desa, kelurahan, dan kelurahan menjadi penanggung jawab seluruh operasional BUMDes. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi masyarakat melalui organisasi profesi atau bisnis, selalu berdasarkan potensi murni desa, merupakan cara kerja BUMDes..

Menurut Data Potensi Desa (PODES) BPS 2020 saat ini persentase desa yang memiliki BUMDes sebesar 72% dari 74.500 desa. Artinya BUMDes belum sepenuhnya tersebar di seluruh penjuru tanah air terhitung sudah 7 tahun sejak diturunkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Badan Usaha Milik Desa. Berikut terdapat data perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia.



Gambar 1.1 Jumlah Bumdes di Indonesia 2014 – 2021

Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah membagi desa berdasarkan IDM nya (Indeks Desa Membangun) menjadi desa yang sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Adanya BUMDes ini salah satunya untuk membantu mewujudkan Desa Mandiri. Desa mandiri ditetapkan oleh Halim Iskandar Menteri PDTT, sebagai desa yang dapat menggunakan teknologi dalam berbagai isu pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lingkungan. Sebuah desa dapat dianggap sebagai desa yang mandiri ketika indeks pembangunan desanya melebihi 75 yang dihitung pada skala 1 hingga 100. Memang pada dasarnya, desa mandiri harus memiliki akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang memumpuni, dengan pelayanan publik dan pemerintah yang baik. Sampai saat ini dari 74.957 desa sesuai dari survei Kemendes PDTT tahun 2021 yang sudah berstatus sebagai Desa Mandiri hanya berjumlah 3.296 desa atau 4% dari desa yang ada di Indonesia

(www.kemendesa.go.id) . Selain itu, sisanya ada Desa Maju berjumlah 15.321 desa, Desa Berkembang berjumlah 38.083 desa, Desa Tertinggal berjumlah 12.635 desa, Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah 5.649 desa. Maka dari itu langkah pertama untuk menuju Desa Mandiri yaitu memanfaatkan adanya BUMDes dengan baik untuk memberdayakan kapasitas ekonomi masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, pendapatan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Desa memiliki banyak potensi murni yang dapat dikembangkan, salah satu potensi desa di Indonesia yang manfaatnya belum dikelola secara maksimal yaitu pada sektor pariwisata dalam pengelolaan desa wisata.

Pengelolaan wisata di desa ini penting, karena desa yang kaya akan potensi wisata alam belum mengalami banyak perubahan dan mempertahankan keasliannya hingga menimbulkan daya tarik bagi wisatawan. Hal ini sejalan dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen Parekraf) No 9 Tahun 2021 tentang pedoman Destinasi Wisata berkelanjutan yang menyatakan bahwa Daya tarik wisata adalah sesuatu yang mempunyai keunikan, keelokan, dan nilai berupa beraneka ragam sumber daya alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi obyek atau sasaran kunjungan wisatawan. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta bermanfaat dalam meningkatkan bidang kerja pengembangan industri pariwisata dapat ditujukan untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alam Indonesia. Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi salah satu komponen pembangunan negara karena berpotensi mendongkrak perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata menempati posisi salah satu terpenting dalam beberapa kebijakan pembangunan Indonesia yang mempunyai aset pariwisata untuk diperkuat dan diberdayakan, hal ini disebabkan adanya kontribusi nyata sektor

pariwisata. Maka dari itu perkembangan atau pembangunan sektor wisata dalam pengelolaan desa wisata sangat potensial untuk dikembangkan

Desa wisata merupakan bentuk implementasi pengembangan masyarakat dan pariwisata berkelanjutan (Dewi, 2013). Tujuan pengembangan pariwisata yang mengikutsertakan masyarakat meliputi 1) pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan, 2) pembinaan peran dan partisipasi masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pembangunan kepariwisataan, dan 3) pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, adalah tujuan pembangunan pariwisata yang mengikutsertakan masyarakat (Munawaroh, 2017). Pemerataan yang sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan harus dicapai melalui pengembangan desa wisata.

Salah satu desa wisata yang saat ini sedang dikembangkan adalah Desa Kebun dadap timur yang terletak di Kec.Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. Salah satu wisata yang terdapat di desa Kebun dadap timur adalah wisata Mangrove Kedatim. Wisata Mangrove Kedatim resmi dibuka pada Juni 2021 tahun lalu. Pada tahun 2022 Kemendes PDTT merilis Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahap 1. Lomba ini diadakan di aplikasi Desa Wisata Nusantara yang dapat diunduh di android dan IOS dengan kriteria pemenang berhasil mendapatkan like terbanyak dari pengunjung atau wisatawan melalui aplikasi tersebut. Wisata Mangrove Kedatim berhasil menduduki peringkat 3 dari 1.407 desa wisata yang terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Hal ini dikarenakan Wisata Mangrove Kedatim telah menunjukkan sinergi dalam menjaga kelestarian alam dengan pertumbuhan ekonomi desa.

Wisata mangrove kedatim bermula dari masyarakat yang peduli akan desanya dan sadar akan potensi mangrove yang ada di muara kali sarokah yang dapat dikelola sehingga memiliki nilai positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Maka terbentuklah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) “Reng Paseser” pada tahun 2017 dan mulai melakukan proker penanaman dengan membeli swadaya bibit mangrove pada tahun 2018 dan menjadi titik awal pembangunan Wisata Mangrove Kedatim. Dari program pembibitan tersebut kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh beberapa organisasi masyarakat lainnya seperti Kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Agar terkelola dengan baik dan secara professional mengenai pembangunan akses dan fasilitas wisata desanya, maka usaha wisata mangrove Desa Kebun Dadap Timur ini dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasopati. Berdasarkan hasil wawancara di tribunnews.com, menurut direktur BUMDes Pasopati, wisata mangrove termasuk membantu dalam meningkatkan pendapatan penduduk desa, membuka lapangan kerja baru serta berbisnis bagi penduduk setempat dan berkontribusi pada pendapat asli desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ori Ade Kapanta (2019) tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perekonomian Desa studi kasus di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa menggunakan Alat analisis Regresi Sederhana ini menghasilkan bahwa BUMDes berperan secara positif dan signifikan terhadap perekonomian desa. Penelitian serupa juga dilakukan Andri (2020) tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember menggunakan Analisis Statistik Deskriptif yang menghasilkan bahwa Peran

BUMDes sebagai mediator, motivator dan fasilitator telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kemiri. Penelitian terdahulu lainnya yang selaras dilakukan oleh Dian (2018) tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Mitra Usaha” dalam meningkatkan Sektor Usaha anggota KUB “Mulyasari” Desa Lohgandu, Kebumen menggunakan Metode Deskriptif Kuantitatif yang menghasilkan bahwa BUMDes berperan dalam peningkatan bidang usaha anggota KUB “Mulyasari” serta omzet dan keuntungan/pendapatan anggota KUB Mulyasari meningkat akibat dari Peran yang dimainkan oleh BUMDesa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan alat analisis Uji Kendall's tau dan Uji Wilcoxon Sign test, yang dimana alat analisis ini belum banyak digunakan sebab penelitian terdahulu menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Kelebihan dalam menggunakan Uji Kendall's tau dapat digunakan untuk menganalisis sampel yang berukuran lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial (Sugiyono, 2013). Serta kelebihan pada Uji Wilcoxon Sign test lebih powerful dibandingkan dengan uji tanda (Siegel, 1956), yang dimana pada uji tanda yang diperhatikan hanyalah arah perubahannya sedangkan pada uji wilcoxon sign test juga memperhatikan besaran dari perubahannya dan tidak memperhitungkan nilai selisih data tersebut (Sungkono, 2008). Perbedaan juga terletak pada variabel yang digunakan, dimana pada penelitian ini menggunakan 3 variabel X yaitu Peran BUMDes sebagai Fasilitator, Mediator, dan Motivator sesuai dengan Peran BUMDes secara umum menurut Prasetyo (2019). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang dimana belum ada penelitian mengenai Peran BUMDes di Desa Kebundadap Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini berupaya meneliti mengenai “Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim Kabupaten Sumenep dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Lokal”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara peran BUMDes Pasopati sebagai Fasilitator, Mediator dan Motivator terhadap pengelolaan wisata mangrove kedatim dengan peningkatan kesejahteraan perekonomian lokal di Desa Kebun Dadap Timur Kec.Saronggi Kabupaten Sumenep?
2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kebun Dadap Timur Kec.Saronggi Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara peran Bumdes Pasopati terhadap pengelolaan wisata mangrove kedatim dengan kesejahteraan perekonomian lokal di Desa Kebun Dadap Timur Kec.Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis Perbedaan pendapatan Sebelum Dan Sesudah Adanya BUMDes dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kebun Dadap Timur Kec.Saronggi Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia akademis serta ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi

pembangunan pada perguruan tinggi dan umum mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan perokonomian lokal.

b. Hasil dari penelitian dapat memberi gambaran mengenai sejauhmana peran BUMDes sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam mempengaruhi peningkatan kesejahteraan perekonomian lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi desa, Badan usaha milik desa memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan potensi desa.

b. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi atau rujukan bagi penelitian yang sama ataupun bagi penelitian selanjutnya.